

**KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh:

Nama: HENDRO DANIEL SIDABUTAR

NIM : 1540050077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2019

VISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034

MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

PESERTA UJIAN SIDANG

Nama : Hendro Daniel Sidabutar

NIM : 1540050077

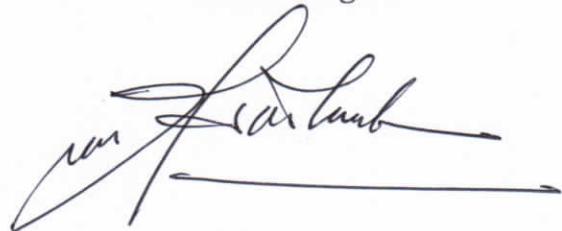
**KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Pembimbing I



(Poltak Siringoringo S.H.,M.H)

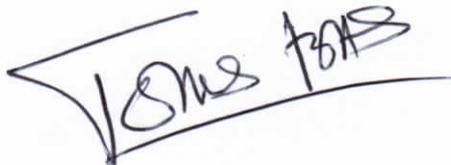
Pembimbing II



(Milton Hasibuan S.H.,M.H)

Mengetahui

Kepala Departemen



(Tomson Situmeang S.H.,M.H)

**KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama: Hendro Daniel Sidabutar

NIM : 1540050077

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SI)

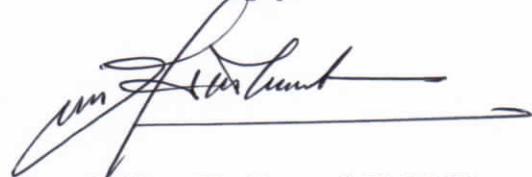
Susunan, Tim Penguji

Penguji I



(Poltak Siringoringo S.H.,M.H)

Penguji II



(Milton Hasibuan S.H.,M.H)

Penguji III



(Tomson Situmeang S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, cinta, dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia memang menjadi fenomena yang sangat mencuri perhatian masyarakat. Timbulnya rasa benci dan amarah akibat ulah oknum-oknum yang mengambil uang rakyat hanya untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya yang menyebabkan semakin sengsaranya masyarakat dan keadaan hidup yang semakin susah. Tindak pidana korupsi memang sudah digolongkan menjadi kejahatan luar biasa karena telah merusak kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Pembentukan lembaga independen yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi adalah harapan satu-satunya yang harus diwujudkan. Melihat perbuatan tindak pidana korupsi yang semakin meluas maka pada tahun 2003 dimasa pemerintahan Ibu Megawati S, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering dikenal sebagai KPK untuk dapat menangani dan memberantas perilaku korupsi dengan kewenangan yang

besar yang bersifat independen bebas dari kekuasaan manapun agar mampu bekerja dengan hasil yang maksimal.

Dorongan untuk membentuk lembaga KPK juga diakibatkan oleh kurang efisien dan kurang efektifnya lembaga sebelumnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Sehingga pembentukan lembaga KPK ini adalah sesuatu yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Dengan adanya lembaga KPK diharapkan untuk bisa mewujudkan Indonesia yang bersih dari perbuatan korupsi. Namun sejak KPK eksis dalam menangani korupsi maka sangat banyak tantangan yang datang yang harus dihadapi oleh KPK. Salah satunya adalah hal yang mempersoalkan KPK sebagai lembaga yang dapat dibubarkan. Oleh karena hal tersebut dan polemik yang ada maka sangat perlu diteliti lebih dalam lagi tentang keberadaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia untuk mampu menjawab polemik-polemik yang ada mengenai KPK. Penelitian ini dapat terlaksana juga karena dukungan dosen pembimbing dan segenap teman-teman dan keluarga penulis.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai hambatan, tantangan, rintangan, sehingga penulis menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang perlu disempurnakan dipenulisan penelitian ini. Penulis sangat berharap agar kiranya penulisan skripsi ini bisa mendukung bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 08 Februari 2019

Penulis

Hendro Daniel Sidabutar

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan buat Yesus Kristus Tuhan dan Juruslamat kita atas segala kasih, kebaikan dan kemurahanNya dalam penyertaan yang senantiasa selalu melindungi dan memberikan kepada penulis kebijaksanaan dan hati yang damai sehingga penulis dapat mengerjakan penelitian ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan hambatan apapun. Izinkanlah penulis menyampaikan satu ayat alkitab sebagai ayat pedoman penulis, “kepada Allah aku percaya aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku” Mazmur 56;12.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Penulis menyadari bahwa memang banyak tantangan banyak rintangan yang harus dilalui sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Namun semua itu tidak menjadi penghambat, tetapi semua itu adalah ujian yang harus dilalui demi mencapai dan mewujudkan mimpi dan cita-cita. Jatuh lalu bangkit gagal kemudian mencoba lagi adalah prinsip penulis yang selalu tertanam didalam hati. Penulis juga menyadari bahwa tanggung jawab paling penting adalah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mampu memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar dikalangan masyarakat, sehingga kelak

nanti penulis berharap mampu menjadi pribadi yang bisa memecahkan masalah dan isu-isu hukum yang kian berkembang timbul dikalangan kehidupan masyarakat terkhususnya untuk mampu membangun tanah air tercinta Indonesia.

Akhirnya tibalah saatnya pada momen yang indah dan bahagia yang menyelimuti haru didalam hati. Penulis menyampaikan terimakasih banyak atas segala cinta kasih dan perjuangan komitmen keluarga mama S br Sinaga, bapak M Sidabutar serta keluarga yang begitu sangat mendorong perjuangan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Semua ini penulis persembahkan buat mereka keluarga terkasih. Penulis sangat kagum dan hormat kepada mereka, karena tanpa mereka maka penulis menyadari tidak akan mendapatkan semua ini suatu kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih juga buat doa gadis kecil keponakan penulis Grace Valentian H Manurung yang begitu antusias selalu memberikan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Jakarta. Tidak lupa juga penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pribadi yang hadir dalam mendorong kesuksesan penyelesaian penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono S.H.,M.H.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia

2. Bapak Hulman Panjaitan S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang sangat banyak berkontribusi dalam membangun kemajuan di Fakultas Hukum .
3. Ibu Elly A.M Pandiangan S.H.,M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I dan selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum (KAPRODI) yang telah menyediakan begitu banyak waktu buat memberikan pendapat disela waktu beliau yang begitu sangat padat dan sibuk, namun tetap memberikan arahan dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar;
5. Bapak Milton Hasibuan S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II yang begitu sangat antusias dalam memberikan banyak koreksian, arahan, kritikan dan nasehat sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar tanpa halangan. Sangat berterima kasih sebenarnya disisi lain beliau sangat sibuk sebagai staff ahli kementrian Hukum dan HAM namun beliau masih memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan banyak masukan dan kritikan terhadap penulisan.
6. Tomson Situmeang S.H.,M.H., sebagai dosen yang telah memberikan banyak waktu buat berdiskusi yang memberikan masukan sebelum penulis menyusun tugas akhir ini dan yang

memberikan banyak masukan terkait data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Sangat menginspirasi sebenarnya melihat karakter dan pola cara beliau mengajar dan mendidik mahasiswa/mahasiswi dikampus, sosok yang begitu sangat penulis segani karna berkat ketemu dengan beliau didalam semester sebelumnya, penulis mulai sadar bagaimana cara proses belajar yang benar dengan banyak baca buku dengan literatur yang berbeda dengan menguasai teori yang kuat seperti bagaimana cara beliau mengajar pada biasanya.

7. Bapak Dr. Manotar Tampubolon S.H.,M.A.,M.H., dosen yang begitu memberikan banyak waktu kontribusi untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan selalu diskusi tentang hukum diluar jam kelas, banyak masukan bahkan nasehat yang beliau sampaikan agar kelak selalu menunjang tinggi kode etik profesi yang diemban.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi banyak nasehat untuk selalu memberi motivasi penyemangat dalam proses belajar dan komitmen yang selalu diperjuangkan demi keberhasilan anak didiknya untuk kiranya dapat menjadi pribadi yang berguna kelak setelah mengakhiri perkuliahan.

9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi dan yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi dalam urusan administrasi dan yang selalu sabar ketika teman-teman selalu datang ke TU hanya untuk menanyakan dosen yang telah hadir maupun dosen yang belum hadir buat mengajar.
10. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis kagumi mama S br Sinaga dan bapa M Sidabutar. Mereka adalah motivasi semangat belajar untuk menghargai kerja keras mereka dalam mencari rupiah sehingga penulis bisa mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa hebat ini. “hugogo pe massari arian nang bodari lao pasikkolahon gellengki asal ma boi sikkola satimbotimbona sikkap ni na tolap gogoki” “semangat berjuang mencari rejeki siang dan malam demi menyekolahkan anaknya agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi semampu aku lakukan”, adalah prinsip hidup orang tua batak yang mereka terapkan kepada penulis. Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan mereka dan senantiasa selalu menyertai dan memberi mereka umur yang panjang.
11. Saudara-saudara kandung penulis bang Frans Zava Herik Sidabutar S.Kom., bang Frengky Junindar Sidabutar, kaka Felina Susianti Sidabutar S.Ikom., kaka Fenny Saripah Sidabutar, dan

Grace Valentian H Manurung, terima kasih buat cinta kasih dan titipan doa yang selalu kalian panjatkan buat mendoakan yang terbaik dari kecil sampai saat ini.

12. Monalisa Nirwana Manullang, sebagai teman yang begitu luar biasa dan spesial, teman belajar, teman debat, teman kemana dan kemana, teman yang selalu bareng belajar diperpustakaan nasional, teman yang sangat mendorong untuk bisa menjadi pribadi yang mau belajar dan berbeda dari orang lain, memberikan banyak masukan, kritikan, arahan dan kepedulian yang begitu khusus, pribadi yang sangat pintar cerdas menjadi wanita tangguh di Fakultas Hukum dengan IP konsisten tertinggi yang tidak bisa dikalahkan banyak teman mahasiswa, sampai semester berlalu dia tetap dalam peringkat tersebut dan menjadi kandidat terkuat sangat luar biasa cerdas.

13. Ibu Pendeta Christin Simanjuntak dan tim doa, sosok yang tidak bisa terlupakan dan tak bisa terbalaskan kebaikannya buat segala waktu, buat segala kesabaran, buat segala doa yang senantiasa dipanjatkan untuk melayani penulis di Medan saat menggumpulkan berangkat ke Jakarta, yang memberikan penulis nasehat terdalam untuk diingat bahkan diteguhkan dalam hati jika sudah merantau harus memiliki karakter seperti rajawali dan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan.

14. Bapak pembicara rohani bapak Martin Pangaribuan, pribadi yang memberikan kesempatan luar biasa saat diMedan dalam pelayanan rohani, memberi kesempatan kepada penulis untuk ikut dalam kegiatan beliau melayani ke beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) diMedan suatu kesempatan yang luar biasa banyak cara yang beliau berikan kepada penulis agar saat memilih merantau harus tetap hati-hati dan terkhusus harus tetap mengandalkan Tuhan.
15. Pitua siregar teman hebat yang membantu banyak penulis dalam memulai perkuliahan diJakarta, dengan memberikan tempat tinggal kos, membantu banyak hal dalam memulai untuk beradaptasi kehidupan diJakarta, sosok yang sederhana namun sangat menghargai persaudaraan
16. Rifan Sirait, teman dekat yang membantu banyak hal dalam perjalanan perkuliahan, sejak memulai merantau kejojja dan akhirnya penulis menetap dijakarta beliau begitu sangat antusias dalam memberikan waktu, perhatian, dan kontribusi membantu teman dalam perantauan.
17. Teman-teman Tim Eagles saat lomba NMCC piala Dekan bergilir yang diselenggarakan oleh UKM Peradilan Semu, terima kasih buat kerja sama dahulu sehingga kita bisa menjadi Juara I dengan Hakim terbaik dan Penuntut Umum terbaik, semoga kedepan kita tetap menjalin hubungan yang baik dan juga kelak

bisa membuat tim dan kerja sama lagi diluar nanti, terima kasih juga buat bang Candro Sihombing yang sangat berkontribusi untuk mau menjadi pelatih tim kala itu.

18. Teman teman mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2015, sebagai teman-teman yang mengawali perkuliahan dikampus dari mahasiswa baru hingga sampai lulus menjadi teman-teman yang memiliki cerita sendiri yang dilalui dikampus khususnya di Fakultas Hukum.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis berharap kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat diterima dikalangan khalayak umum dan mampu memberikan banyak manfaat pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

- A. Nama : Hendro Daniel Sidabutar
B. NIM : 1540050077
C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Tata Negara
D. Judul : Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
E. Halaman : i-xx + 147 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Keberadaan KPK, Ketatanegaraan Indonesia
G. Daftar Acuan : 25 buku + Undang-undang No 30 Tahun 2002 +
Risalah Pembentukan KPK + Undang- undang No
31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-
undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi + TAP MPR NO IX/1998+
TAP MPR NO VIII/MPR/2001 + Webside +
Jurnal
H. Ringkasan Isi :

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dan perkembangan konstitusi yang juga telah mempengaruhi keberadaan lembaga negara menjadi luas. Sehingga telah banyak lembaga negara yang dibentuk diluar dari UUD 1945 yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat. Penyakit korupsi yang masih menjadi persoalan terbesar yang harus dilawan karena perbuatan ini tidak hanya menyerang aparat pemerintah saja, namun juga telah merambah ke bidang kekuasaan lainnya yang juga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak ekonomi serta hak-hak sosial masyarakat sehingga persoalannyapun sudah menjadi persoalan kompleks menyangkut hukum, politik, ekonomi, sosial, serta merusak moralitas yang begitu serius yang telah melanda seluruh lapisan sosial masyarakat dan telah membahayakan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan luar biasa, yang perlu diberantas dengan cara yang non konvensional. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani dan memberantas tindak pidana korupsi secara khusus dengan cara-cara yang luar biasa yang kewenangannya berbeda dengan lembaga lain. Alasan pembentukan lembaga KPK ini adalah akibat kurang efektif dan efisiennya lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya seperti kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga diharapkan dengan pembentukan lembaga KPK ini, maka diharapkan korupsi dapat dilawan dan diberantas diIndonesia.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku, arsip/dokumen dan juga dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap lembaga juga memiliki batasan agar tidak bertentangan dengan ciri negara hukum. sehingga untuk mengetahui keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka perlu diketahui bagaimana fungsi dan wewenang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menguraikan landasan teori lembaga negara, sistem ketatanegaraan berdasarkan perspektif lembaga negara, teori negara dan konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, ide negara hukum, teori kewenangan, serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, serta landasan pemikiran untuk membentuk lembaga KPK, eksistensi lembaga KPK dalam mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia.

- I. Dosen Pembimbing :
- 1. Dosen Pembimbing I : Poltak Siringoringo S.H.,M.H
- 2. Dosen Pembimbing II : Milton Hasibuan S.H.,M.H

ABSTRACT

- J. Nama : Hendro Daniel Sidabutar
K. NIM : 1540050077
L. Bagian/Prog.Sus : Hukum Tatanegara
M. Judul : Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
N. Halaman : i-xvii + 147 Halaman + Daftar Pustaka
O. Kata Kunci : Keberadaan KPK, Ketatanegaraan Indonesia
P. Daftar Acuan : 25 buku + Undang-undang No 30 Tahun 2002 +
Risalah Pembentukan KPK + Undang- undang No
31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-
undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi + TAP MPR NO IX/1998+
TAP MPR NO VIII/MPR/2001 + Webside +Jurnal
- Q. Ringkasan Isi :

The Amendment to the 1945 Constitution has brought about changes and developments in the constitution which have also influenced the existence of state institutions to be broad. So that many state institutions have been formed outside of the 1945 Constitution which are expected to be able to accommodate the various complexities faced by society. Corruption is still the biggest problem that must be resisted because this action does not only attack the government apparatus, but also has penetrated into other areas of power which are also violations of Human Rights (HAM), economic rights and social rights of the people so that the problem has become a complex issue concerning law, politics, economics, social affairs, and damaging such a serious morality that has engulfed all social strata of society and has endangered the upholding of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Corruption is an extraordinary crime, which needs to be eradicated in a non-conventional manner. The Corruption Eradication Commission (KPK) is a specially formed institution to deal with and eradicate corruption in a special way with extraordinary methods whose authority is different from other institutions. The reason for the establishment of this KPK institution is the result of the ineffectiveness and inefficiency of pre-existing state institutions such as the prosecutor's office and the police in combating corruption. So it is

expected that with the establishment of this KPK institution, it is hoped that corruption can be resisted and eradicated in Indonesia.

The method used by the author in this study is by library research using documents obtained through research of books, archives / documents and also with the approach of the law relating to the problem under study. The document obtained is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been applied so that it is expected to obtain a clear and concrete picture of the object discussed qualitatively and then presented descriptively, namely explaining, deciphering, and describing in accordance with the problems closely related to this research.

Indonesia is a legal state in which every institution also has restrictions so as not to conflict with the characteristics of the rule of law. so to know the existence of the Corruption Eradication Commission in the Indonesian constitutional system, it is necessary to know how the functions and authority of the KPK in the Indonesian constitutional system outline the theoretical basis of state institutions, constitutional systems based on the perspective of state institutions, state theory and constitution, the theory of separation of powers, the idea of a state of law, the theory of authority, as well as the development of Indonesian state administration after the amendments to the 1945 Constitution, as well as the rationale for forming a KPK institution, the existence of KPK institutions in influencing the Indonesian state administration system.

- R. Dosen Pembimbing :
3. Dosen Pembimbing I : Poltak Siringoringo S.H.,M.H
 4. Dosen Pembimbing II : Milton Hasibuan S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Visi Misi Universitas Kristen Indonesia	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	viii
Abstrak	xvi
Abstract	xviii
Daftar Isi	xx
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II Tinjauan Kepustakaan.....	24
A. Negara.....	24
1. Istilah Negara.....	24
2. Tujuan Negara.....	26
B. Sejarah Ketatanegaraan diIndonesia.....	27
1. Periode Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.....	27
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	38
1. Konsep Pembagian Kekuasaan.....	38
2. Pembagian Kekuasaan Menurut Jhon Lock.....	39
3. Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu.....	40
4. Pemisahan Kekuasaan diIndonesia.....	41
D. Sistem Ketatanegaraan diIndonesia sebelum Perubahan UUD 1945.....	44
E. Sistem Ketatanegaraan diIndonesia Sesudah Perubahan UUD 1945.....	47
F. Tinjauan Umum tentang KPK.....	53
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.....	53
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi...	54
BAB III Pembahasan.....	58

A. Pengertian Lembaga Negara Serta Batasan dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	58
1. Pengertian Lembaga Negara diIndonesia.....	58
2. Lembaga Negara yang Wewenangnya Berdasarkan UUD 1945.....	77
3. Perkembangan Lembaga Negara yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan lain Diluar Dari UUD 1945.....	91
BAB IV Kelembagaan KPK Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	102
A. Sejarah Pembentukan KPK.....	102
B. Kelembagaan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan.....	114
C. Keberadaan KPK yang Independen.....	126
1. Perbandingan KPK Dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi Dibeberapa Negara	133
a. Australia.....	134
b. Hongkong.....	135
c. Malaysia.....	136
d. Singapura.....	137
e. Thailand.....	138
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	145

Daftar Pustaka.....

Lampiran.....